

# LAPORAN IMPLEMENTASI GERAKAN OGI 2013



OPEN  
GOVERNMENT  
INDONESIA

OGI

# DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Ringkasan Eksekutif .....</b>                    | <b>2</b>  |
| <b>Inovasi OGI 2013</b><br>Partisipasi 2.0 .....    | <b>3</b>  |
| <b>Fokus Renaksi 2013</b><br>3 Area Strategis ..... | <b>4</b>  |
| <b>Inovasi Pengelolaan Gerakan OGI.....</b>         | <b>12</b> |
| <b>Perluasan OGI di Tahun 2014-2015 .....</b>       | <b>14</b> |
| <b>Lampiran .....</b>                               | <b>16</b> |

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Aksi Open Government Indonesia 2013 (Renaksi OGI 2013) merupakan rencana aksi (renaksi) kedua yang dibentuk sebagai komitmen Indonesia kepada Open Government Partnership (OGP). Renaksi OGI 2013 mempertimbangkan pembelajaran dari hasil Renaksi OGI tahun 2012<sup>1</sup> termasuk evaluasi dari berbagai pihak. Jika di tahun 2012 telah diluncurkan 124 renaksi, maka di tahun 2013 diluncurkan 21 renaksi. Di samping itu, ke-21 Renaksi OGI 2013 tersebar di 3 peraturan yaitu Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2013 (4 renaksi), Renaksi OGI 2013 (15 renaksi) dan Rencana Aksi Kemudahan Berusaha di Indonesia (2 renaksi).

Perbandingan Tingkat Ketercapaian Renaksi OGI

| Tahun | Jumlah Renaksi | Pencapaian (%) |
|-------|----------------|----------------|
| 2012  | 38 Renaksi     | 76,6%          |
| 2013  | 21 Renaksi     | 85,7%          |

Renaksi OGI 2013 ditujukan untuk menjawab 4 dari 5 Tantangan Utama OGP, yaitu peningkatan layanan publik, peningkatan integritas aparatur pemerintah, manajemen sumber daya publik yang efektif dan transparan, dan peningkatan akuntabilitas sektor swasta. Penyusunan dan pengawalan pelaksanaan program OGI selalu diusahakan melalui kolaborasi erat antara pemerintah dan perwakilan masyarakat yang secara sukarela tergabung dalam Tim Inti OGI. Tim Inti OGI bertanggung jawab merencanakan, menjaring masukan dari masyarakat, mensosialisasikan, dan melaksanakan program-program OGI.

Progres gerakan OGI selama tahun 2013 berjalan

menggembirakan dimana hal ini turut didukung dengan Indonesia menjadi *lead chair* OGP pada Oktober 2013. Sebanyak 40 pelajar dan mahasiswa se-Indonesia yang terpilih dari 200-an pendaftar mengikuti sebuah konferensi bertajuk *Model Open Government Partnership* (MOGP) yang berlangsung 2 hari pada 4-5 Oktober 2013. Terobosan lain yaitu pencapaian portal informasi layanan publik Satu Layanan yang terpilih sebagai pemenang Bubu Awards v.08 untuk kategori *Government*<sup>2</sup> dan terbukti bahwa Satu Layanan telah diakses sebanyak 1,5 juta lebih pengunjung. Dari sisi kelembagaan, *open government* di Indonesia juga berhasil mempercepat pendirian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di 100% jajaran Kementerian/Lembaga (70 K/L) di bawah Kabinet Indonesia Bersatu II, 28 provinsi, 196 kabupaten, dan 60 kota. Di dalam laporan ini pula akan nampak berbagai contoh implementasi OGI, baik yang didorong oleh pemerintah maupun yang didorong oleh masyarakat.

Selama masa implementasi OGI tahun 2013, berbagai pembelajaran dipetik Pemerintah Indonesia untuk terus menyempurnakan komitmen OGI pada tahun-tahun berikutnya. OGI 2014 harus memperkuat sistem yang mendukung transparansi pemerintah dan mensosialisasikan inisiatif dan prinsip *open government* ke publik lebih mendalam. Dengan begitu, penerapan *open government* di segala lini pemerintahan akan semakin meluas, serta partisipasi dan aspirasi masyarakat akan lebih mudah terakomodasi.

1 | Laporan pelaksanaan Renaksi OGI 2012 dapat diakses melalui situs OGP [www.opengovpartnership.org](http://www.opengovpartnership.org)

2 | <http://opengovindonesia.org/satulayanan-net-mendapat-penghargaan-bubu-awards/>

# INOVASI OGI 2013

## Partisipasi 2.0

Demi meningkatkan transparansi dan partisipasi pemerintah serta publik, Tim OGI memiliki empat inovasi utama yang dilakukan di tahun 2013 untuk semakin agresif dalam melaksanakan praktek *open government*. Inovasi yang dimaksud menasar kepada peningkatan kesadaran dan partisipasi dari pemuda Indonesia mengenai Open Government Indonesia melalui program E-Transparency Award, Penambahan Anggota Tim Inti OGI, LAPOR! di daerah, Model Open Government Partnership (MOGP), dan Kontes Inovasi SOLUSIMU.

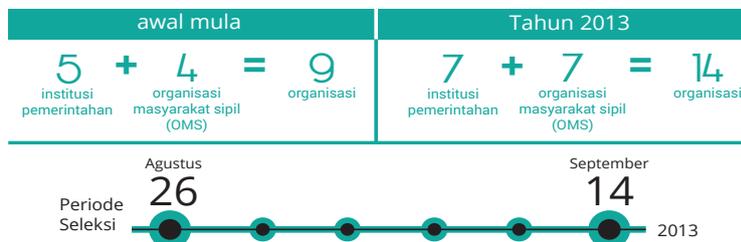
### 1. E-Transparency Award

OGI turut mendukung inovasi yang dilakukan oleh pihak lain sebagai upaya untuk menyebarkan nilai-nilai dari transparansi, partisipasi dan inovasi. E-Transparency Award adalah kompetisi mengenai situs resmi kementerian yang menilai kondisi saat ini dan kondisi perubahannya setelah diberi masukan. Acara ini diselenggarakan oleh Universitas Paramadina selama 4 bulan dan penganugerahan dilakukan pada tanggal 19 Desember 2013.

#### Pemenang

- Kementerian Perindustrian
- Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Kementerian PU

### 2. Penambahan Anggota Tim Inti OGI



#### Tujuan

memperkuat gerakan dalam membangun semangat *open government* di Indonesia

### 3. LAPOR! di Daerah



bergabung pada tanggal 18 April 2013

bergabung pada tanggal 18 Oktober 2013



membuktikan makin tingginya kesadaran lembaga daerah untuk menjadi transparan dan menerima keluhan dan saran dari masyarakat

### 4. Model Open Government Partnership (MOGP)



OGI hadir di berbagai kampus di Indonesia dalam bentuk Model Open Government Partnership (MOGP) di kalangan mahasiswa pada 30 Agustus hingga 3 September 2013. Roadshow ini dilakukan di 6 kampus sekaligus, yaitu ITB, UNPAR, UNAIR, UPH, UNHAS dan UI. Roadshow ini diyakini dapat menjadi ajang untuk membangun semangat transparansi dan memperkenalkan inisiatif dan prinsip-prinsip pemerintah terbuka secara umum di kalangan anak muda. Tujuan strategisnya adalah untuk mengenalkan *open government* sedini mungkin sehingga *open government* dapat menjadi gaya hidup bangsa Indonesia di masa depan.

### 5. Kontes Inovasi SOLUSIMU

Suatu kompetisi yang menjangkau berbagai solusi dari masyarakat melalui berbagai saluran yaitu:



ROADSHOW



VIDEO



FLYER



SURAT



SITUS



INFOGRAFIS

SOLUSIMU menghasilkan:

3314 IDE melalui 3 TAHAPAN PENJURIAN ... 10 FINALIS

# FOKUS RENAKSI 2013:

## 3 Area Strategis

### Struktur Rencana Aksi 2013

Pada tahun 2013, telah tersusun 21 renaksi OGI yang merinci komitmen *open government* yang telah dilakukan oleh pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ke-21 renaksi ini dikelompokkan dalam 3 kelompok dimana setiap kelompok memiliki fokus dan dinamika tantangan yang berbeda-beda, namun saling berkaitan dan saling melengkapi.

Pembagian kelompok struktur rencana aksi OGI 2013 seperti dibawah ini :

| Kelompok                 | 1   | 2   | 3  |
|--------------------------|---|---|--|
| <b>Tipe Kegiatan</b>     | Layanan warga yang rawan pungutan liar  | Layanan investasi dan usaha yang rawan korupsi  | Infrastruktur <i>open government</i>   |
| <b>Area Pengembangan</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan</li> <li>• Kependudukan</li> <li>• Akta Pernikahan</li> <li>• Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat)</li> <li>• Haji</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perizinan usaha</li> <li>• Pertanahan</li> <li>• Sumber Daya Alam</li> <li>• Anggaran</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)</li> <li>• Daerah percontohan OG</li> </ul>  |
| <b>Ringkasan</b>         | Renaksi ini berusaha mengatasi tantangan OGP yaitu memperbaiki layanan publik dan meningkatkan integritas publik.   | Renaksi ini berusaha untuk mengatasi tantangan OGP yaitu manajemen sumber daya publik yang efektif dan transparan, dan peningkatan akuntabilitas sektor swasta. | Renaksi ini berusaha untuk memastikan operasionalisasi prinsip OG terlaksana di dalam tubuh pemerintah baik pusat, daerah dan yang terafiliasi menggunakan dana dari masyarakat yang harus dipertanggung jawabkan. Adapun fokus dari inisiatif ini adalah <i>pilot project</i> transparansi anggaran dan pembentukan PPID di 3 daerah. |

Khusus rencana aksi kelompok Infrastruktur *open government*, salah satu kegiatan yang bersifat inovatif adalah Kompetisi Majalah Dinding (Mading) bertema khusus Transparansi BOS di Kalimantan Tengah. Disertai program lain yaitu *Open School* (Penerimaan siswa baru *online*) dan *Open Budget* (Keterbukaan anggaran daerah) di masing-masing daerah percontohan.

### Proses Penyusunan Rencana Aksi 2013

Renaksi ini dirumuskan melalui serangkaian proses yang transparan dan melibatkan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan yang mewakili Kementerian/Lembaga (K/L), sektor swasta dan BUMN, serta akademisi dan masyarakat sipil. Melalui serangkaian *Focus Group Discussion* (FGD), berbagai lokakarya –baik lokakarya terbatas maupun gabungan pada tingkat nasional–, serta rapat-rapat teknis, rencana aksi ini dirumuskan, dibahas, serta direvisi secara bersama-sama. Dalam pelaksanaannya, setiap lembaga publik diberikan kesempatan untuk menyusun rencana implementasi keterbukaan di lembaganya masing-masing, yang kemudian dibahas bersama dalam kelompok FGD di forum konsultasi publik untuk menghasilkan rancangan renaksi OGI 2013. Selanjutnya, rancangan renaksi dimaksud kembali dikonsultasikan dengan pemangku kepentingan (proses penajaman) untuk menghasilkan renaksi OGI 2013 yang bersifat final. Pertimbangan berasal dari berbagai evaluasi berbagai pihak seperti *Independent Reporting Mechanism*, kerjasama dengan *Boston Consulting Group* dan Laporan independen OMS di Indonesia sebagai berikut:

## Pertimbangan Dalam Penyusunan Strategi OGI

- A.** Perlunya desentralisasi dalam manajemen OGI, fokus renaksi yang diperluas, dan penitikberatan pemanfaatan internet dalam OGI.
- B.** Penguatan kelembagaan dan manajemen OGI serta perluasan sektor/rekan yang dilibatkan serta partisipasi publik.
- C.** Hasil evaluasi capaian kinerja Renaksi OGI Tahun 2012.
- D.** Fokus pada area yang strategis yang disertai penguatan infrastruktur Open Government Indonesia.
- E.** Penjangkauan berbagai daerah di Indonesia.
- F.** Kekhususan momentum dan lingkup area.
- G.** Kekuatan dan kepastian pelaksanaan renaksi melalui berbagai instrumen regulasi.

## Strategi Implementasi Gerakan OGI 2013

Renaksi OGI Tahun 2013 tetap berpijak pada harapan pemangku kepentingan, dilaksanakan dengan berbasis pada instrumen berikut:

- 1 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (4 renaksi)**  
Dengan berbasis Inpres tersebut, 4 renaksi difokuskan pada penjangkauan daerah dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota sehingga menghasilkan 102 sub rencana aksi. Renaksi ini termasuk dalam pengelompokan fokus "layanan investasi dan usaha yang rawan korupsi".
- 2 Rencana Aksi OGI Tahun 2013 (15 renaksi)**  
Merupakan yang utama dalam Rencana Aksi OGI Tahun 2013 yang berisi 15 renaksi yang menjelaskan 3 kelompok fokus dari renaksi ini.
- 3 Rencana Aksi Kemudahan Berusaha di Indonesia 2013 (2 renaksi)**  
Merupakan Instrumen lain dari Renaksi OGI 2013 yang masuk dalam pengelompokan fokus "layanan investasi dan usaha yang rawan korupsi".

Berikut adalah pihak-pihak yang terlibat di dalam proses penyusunan renaksi 2013:



Konsultasi dengan sektor swasta dan BUMN. 13 Februari 2013



Konsultasi dengan akademisi dan masyarakat sipil tanggal 13 Februari 2013



Konsultasi Penajaman dengan Kementerian/Lembaga tanggal 28 Februari 2013

Proses tersebut juga turut dipublikasikan melalui situs Open Government Indonesia<sup>3</sup>. Sebagai bukti nyata atas semangat perubahan ini, renaksi 2013 memiliki total 21 renaksi (termasuk di Instruksi Presiden No. 1 tahun 2013 dan Rencana Aksi Kemudahan Berusaha 2013). Untuk lebih lengkapnya, seluruh renaksi OGI 2013 dapat dilihat pada situs Open Government Indonesia<sup>4</sup>.

3 | <http://opengovindonesia.org/mari-berpartisipasi-dalam-konsultasi-publik-rencana-aksi-ogi-2013/>

4 | <http://opengovindonesia.org/wp-content/uploads/2013/05/Renaksi-OGI-2013.pdf>

## Capaian Rencana Aksi 2013

Momentum penting didaulatnya Indonesia sebagai *lead chair* OGP sejak Oktober 2013 semakin menyulut antusiasme berbagai pemangku kepentingan di Indonesia untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan terbuka. Dalam bab ini akan dipaparkan pencapaian OGI pada tahun 2013, yang meliputi 15 rencana aksi dalam OGP.

### A. Rencana Aksi Indonesia dalam OGP 2013 dan Pencapaiannya

Rencana aksi Indonesia dalam OGP tahun 2013 terdiri dari 15 rencana aksi yang secara umum telah mengalami kemajuan yang menggembirakan. Ke-15 rencana aksi ini berfokus pada transparansi di bidang-bidang yang:

- rentan akan terjadinya tindak korupsi,
- menyangkut layanan dasar masyarakat, dan
- berpotensi untuk menimbulkan konflik di masyarakat.

Beberapa bidang yang tersentuh rencana aksi ini adalah layanan publik, pendidikan, keagamaan, pertanahan, pengelolaan anggaran, pengelolaan sumber daya, pembentukan badan publik, pengadaan barang dan jasa, dan perizinan usaha. Secara umum, rencana-rencana aksi baik yang berkaitan dengan pengembangan partisipasi publik dan transparansi data/dokumen layanan dasar masyarakat (yang dilakukan melalui situs instansi tersebut) telah berjalan sesuai harapan.

Secara lebih detail, progres implementasi ke-15 rencana aksi OGI tahun 2013 adalah sebagai berikut:

#### A.1 Peningkatan Layanan Warga yang Rawan Pungutan Liar (1/2)

| NO. | RENCANA AKSI  | DESKRIPSI HASIL  | STATUS   |
|-----|---|--|--|
| 1.  | Mendorong transparansi dan akuntabilitas layanan publik di Kepolisian RI      | Terpublikasikannya informasi layanan meliputi jenis layanan, mekanisme/prosedur, biaya dan waktu melalui poster yang terkait dengan pengurusan SIM, STNK/BPKB, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di seluruh wilayah Sumatera, Jawa, Bali serta sistem pengaduan layanan.<br><br><a href="http://ntmc-korlantaspolri.blogspot.com/2012/06/syarat-dan-tata-cara-mutasi-kendaraan.html">http://ntmc-korlantaspolri.blogspot.com/2012/06/syarat-dan-tata-cara-mutasi-kendaraan.html</a>   |   |
| 2.  | Mendorong transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pelaksanaan program BOS | <ul style="list-style-type: none"><li>Data alokasi BOS telah dipublikasikan melalui situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disertai dengan publikasi kinerja layanan pengaduan menyangkut BOS untuk sekolah di 33 provinsi.</li><li>Publikasi kinerja layanan di papan pengumuman seluruh sekolah penerima di Jawa dan Bali.</li></ul><br><a href="http://bos.kemdiknas.go.id/home/berita/48">http://bos.kemdiknas.go.id/home/berita/48;</a><br><a href="http://bos.kemdiknas.go.id/pengaduan/">http://bos.kemdiknas.go.id/pengaduan/</a><br><a href="http://bos.kemdikbud.go.id/rekap/penggunaanKomponen/provinsi/SEMUA/11/?tahun=2013">http://bos.kemdikbud.go.id/rekap/penggunaanKomponen/provinsi/SEMUA/11/?tahun=2013.</a> | <br> |
| 3.  | Peningkatan kualitas transparansi Kementerian Agama                           | Publikasi data telah dilakukan melalui situs Kementerian Agama meliputi rincian biaya haji, jumlah keberangkatan haji berdasarkan Kabupaten/Kota, daftar rencana keberangkatan kloter dan embarkasi, dan layanan status antrian haji.<br><br><a href="http://haji.kemenag.go.id/index.php/subMenu/573">http://haji.kemenag.go.id/index.php/subMenu/573</a>   |   |

### A.1 Peningkatan Layanan Warga yang Rawan Pungutan Liar (2/2)

| NO. | RENCANA AKSI   | DESKRIPSI HASIL  | STATUS  |
|-----|--|--|---|
| 4.  | Mendorong transparansi dan akuntabilitas layanan publik di Kantor Urusan Agama (KUA) | Publikasi informasi layanan pernikahan meliputi mekanisme/prosedur, biaya dan waktu layanan melalui poster serta beroperasinya sistem pengaduan di Kantor Urusan Agama di Kabupaten/Kota seluruh provinsi Jawa, Sumatera, dan Bali.  |  |
| 5.  | Mendorong perlindungan atas hak konsumen pengguna jalan tol                          | Publikasi data telah dilakukan melalui situs meliputi informasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol serta perusahaan pengelola jalan tol kepada masyarakat.<br><br><a href="http://www.jasamarga.com/informasi-tol/layanan-jalan-tol.html">http://www.jasamarga.com/informasi-tol/layanan-jalan-tol.html</a> |  |

### A.2. Peningkatan Layanan Investasi dan Usaha (1/2)

| NO. | RENCANA AKSI  | DESKRIPSI HASIL  | STATUS  |
|-----|---|--|---|
| 6.  | Mendorong investasi usaha melalui integrasi kebijakan dan regulasi mengenai pertanahan di Indonesia dalam bentuk satu dokumen | Sedang disusun dan diterbitkan dokumen yang telah mengintegrasikan semua regulasi menyangkut pengurusan kepemilikan dan penggunaan tanah, informasi tersebut juga telah dipublikasikan dan dapat diakses melalui situs BPN ( <a href="http://site.bpn.go.id/o/Layanan-Pertanahan.aspx">http://site.bpn.go.id/o/Layanan-Pertanahan.aspx</a> ), serta telah tersedia pelaksanaan konsultasi publik menyangkut rancangan dokumen. |  |
| 7.  | Mendorong transparansi layanan perizinan usaha/ penanaman modal di daerah   | Beroperasinya <i>tracking system</i> layanan izin usaha/penanaman modal di 10 provinsi dan 10 kabupaten/kota.  |  |
| 8.  | Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan pengelolaan hutan   | Terpublikasikannya data dan informasi produksi dan peredaran hasil hutan, dan luran Hasil Hutan (PSDH & DR), serta beroperasinya <i>timber tracking system</i> di 88 Unit manajemen.<br><br><a href="http://puhh.dephut.go.id/pls/hph/home_default">http://puhh.dephut.go.id/pls/hph/home_default</a>  |  |
| 9.  | Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan pengelolaan Sumber Daya Alam  | Publikasi data mengenai informasi kegiatan perusahaan sumber daya alam migas dan pertambangan di situs Kementerian ESDM meliputi informasi produksi migas dan pertambangan, informasi penerimaan migas dan pertambangan dan daftar izin usaha pertambangan yang telah <i>clean and clear</i> .<br><br><a href="http://www.kip.esdm.go.id">www.kip.esdm.go.id</a>   |  |

## A.2. Peningkatan Layanan Investasi dan Usaha (2/2)

| NO. | RENCANA AKSI   | DESKRIPSI HASIL  | STATUS  |
|-----|--|--|---|
| 10. | Transparansi penerimaan pengelolaan sumber daya alam migas dan pertambangan  | Terpublikasikannya laporan hasil rekonsiliasi <i>Extractive Industries Transparency Initiative</i> (EITI) Indonesia yang mencakup informasi pembayaran dan penerimaan dari pajak dan non-pajak dari kegiatan industri ekstraktif migas dan pertambangan 2010-2011.   |    |
| 11. | Memastikan terpublikasikannya dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA)- Kementerian/ Lembaga (K/L), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), realisasi anggaran 3 bulanan dan Laporan Realisasi Anggaran pada situs seluruh (K/L) | Terpublikasikannya Rencana Kerja Anggaran (RKA)- Kementerian/ Lembaga (K/L), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Realisasi Anggaran 3 Bulanan dan Laporan Realisasi Anggaran pada seluruh situs Kementerian/Lembaga <sup>5</sup> .   |    |
| 12. | Mendorong pengintegrasian proses perencanaan penganggaran berbasis kinerja di tingkat pusat  | Berjalannya sistem informasi rencana kerja Kementerian/ Lembaga dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga yang terintegrasi serta memuat indikator kinerja yang dapat diakses oleh publik.<br><br><a href="http://bappenas.go.id/berita-dan-siaran-pers/kegiatan-utama/3767-aplikasi-renja-kl-2014">http://bappenas.go.id/berita-dan-siaran-pers/kegiatan-utama/3767-aplikasi-renja-kl-2014</a> ;<br><a href="http://www.bappenas.go.id">www.bappenas.go.id</a> |  |

## A.3. Infrastruktur Implementasi Open Government Indonesia (1/2)

| NO. | RENCANA AKSI   | DESKRIPSI HASIL  | STATUS  |
|-----|--|--|---|
| 13. | Operasional layanan informasi Badan Publik lingkup Pemerintah Pusat melalui pembentukan PPID Badan Publik dan perangkatnya | Terbentuk PPID badan publik, Prosedur Operasional Standar (POS) layanan informasi, dan daftar informasi publik di 70 Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK). Saat ini baru tercapai di 36 LPNK. |  |

5 | <http://www.anggaran.depkeu.go.id/content/Publikasi/Leaflet%20PDF/RKA-KL%202011.pdf>

### A.3. Infrastruktur Implementasi Open Government Indonesia (2/2)

| NO. | RENCANA AKSI   | DESKRIPSI HASIL   | STATUS  |
|-----|--|---|---|
| 14. | Mendorong percepatan pembentukan operasional layanan informasi lingkup Pemda melalui pembentukan PPID Pemda dan perangkatnya | Terkirimnya radiogram/surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mendorong percepatan dan evaluasi pembentukan PPID Pemda, Terbitnya SK Tim Asistensi dan Supervisi pembentukan PPID Pemda, Tersusunnya strategi dan rencana kerjaserta evaluasi pembentukan PPID Pemda, dan Terlaksananya Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PPID Pemda.   |    |
| 15. | Mendorong Implementasi Open Government secara penuh di Provinsi /Kab/Kota Percontohan  | <p>Terlaksananya <i>pilot project</i> implementasi <i>open government</i> di Kalimantan Tengah, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kota Ambon. dua tahun kegiatan proyek daerah percontohan (<i>pilot project</i>) <i>Open Government</i> dilaksanakan dan fokus pada transparansi anggaran daerah, transparansi pendidikan (dana BOS dan penerimaan siswa), layanan kesehatan, dan operasionalisasi PPID. Nota kesepahaman daerah percontohan telah ditandatangani pada bulan November 2012 dan selesai dalam enam bulan. Hasil dari daerah percontohan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah terpublikasinya laporan keuangan (<i>open budget</i>) di Kota Ambon. (<a href="http://www.ambon.go.id/index.php/transparansi-anggaran.html">http://www.ambon.go.id/index.php/transparansi-anggaran.html</a>)</li> <li>2. <i>Open school</i> tertuang dalam program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online (<a href="http://www.ppdb.kemdikbud.go.id">www.ppdb.kemdikbud.go.id</a>) di 3 wilayah Provinsi Kalteng (<a href="http://kotapalangkaraya.siap-ppdb.com/">http://kotapalangkaraya.siap-ppdb.com/</a>), Kabupaten Indragiri Hulu (<a href="http://indragirihulu.siap-ppdb.com/#!/020001/sekilas">http://indragirihulu.siap-ppdb.com/#!/020001/sekilas</a>) dan Kota Ambon (<a href="http://arsip.siap-ppdb.com/2013/ambon/#!/030001/hasil/seleksi/p/36010002/1/simple">http://arsip.siap-ppdb.com/2013/ambon/#!/030001/hasil/seleksi/p/36010002/1/simple</a>).</li> <li>3. Operasionalisasi PPID di Provinsi Kalteng, Kota Ambon<sup>11</sup> (<a href="http://www.ambon.go.id/data/PPID/Keputusan%20Walikota%20Ambon%20No%2024%20Thn%202013.pdf">http://www.ambon.go.id/data/PPID/Keputusan%20Walikota%20Ambon%20No%2024%20Thn%202013.pdf</a>) dan Kabupaten Indragiri Hulu (<a href="http://inhukab.sip-ppid.net/">http://inhukab.sip-ppid.net/</a>).</li> </ol> |  |

#### Keterangan:



: Selesai



: Dalam Proses Penyelesaian

#### B. Aksi Lainnya dalam Strategi Implementasi Gerakan OGI 2013

Selain 15 aksi yang menjadi komitmen Indonesia pada OGP, terdapat enam rencana aksi lain yang mencakup:

- a) Penyederhanaan perizinan dalam usaha pencegahan korupsi
- b) Transparansi keuangan daerah
- c) Penguatan infrastruktur keterbukaan informasi

Keenam rencana aksi ini diimplementasikan oleh berbagai institusi pemerintah di pusat dan di daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota). Keenam renaksi dijelaskan sebagai berikut:

### B.1 Rencana Aksi OG 2013 di Rencana Aksi Meningkatkan Kemudahan Berusaha di Indonesia

| NO. | RENCANA AKSI   | DESKRIPSI HASIL  | HASIL   |
|-----|--|--|---|
| 1.  | Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). | Tercapainya penerbitan SIUP dan TDP di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 3 hari kerja dan telah dilaksanakan di 6 daerah yaitu DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bogor, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Wonosobo  |  |
| 2.  | Penyederhanaan prosedur perizinan terkait bangunan                     | Tercapainya perbaikan prosedur pengurusan, waktu dan biaya terkait pendirian bangunan disertai tercapainya pelimpahan kewenangan penerbitan IMB dari Gubernur DKI Jakarta kepada Kepala PTSP dengan dikeluarkannya Peraturan Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI No. 2 Tahun 2014 tentang Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) secara elektronik. |  |

### B.2 Rencana Aksi OG 2013 di Instruksi Presiden 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Daerah (1/2)

| NO. | RENCANA AKSI   | DESKRIPSI HASIL   | HASIL   |
|-----|--|---|---|
| 1.  | <p>Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ringkasan RKA PPKD (Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah).</li> <li>• Ringkasan RKA SKPD (Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah).</li> <li>• Raperda APBD (Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).</li> <li>• Raperda Perubahan APBD (Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).</li> <li>• Perda APBD (Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).</li> <li>• Perda Perubahan APBD (Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).</li> <li>• Ringkasan DPA SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah).</li> <li>• Ringkasan DPA PPKD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah).</li> <li>• LRA seluruh SKPD (Laporan Realisasi Anggaran seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah).</li> <li>• LRA PPKD LKPD Yang Sudah Di Audit Opini atas LKPD (Laporan Realisasi Anggaran seluruh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah).</li> </ul> | Tercapainya penerbitan SIUP dan TDP di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 3 hari kerja dan telah dilaksanakan di 6 daerah yaitu DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bogor, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Wonosobo |  |

**B.2 Rencana Aksi OG 2013 di Instruksi Presiden 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Daerah (2/2)**

| NO. | RENCANA AKSI  | DESKRIPSI HASIL  | HASIL   |
|-----|---|--|---|
| 2.  | Pelaksanaan transparansi proses pengadaan barang dan jasa                                       | Tersusunnya rencana umum pengadaan barang dan jasa secara elektronik sebesar 70% dari nilai total pengadaan di 33 provinsi dan 69 kabupaten/kota.  |  |
| 3.  | Publikasi dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah          | Terpublikasikannya melalui situs, yaitu rencana pembangunan daerah [Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)] serta Dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD dan Renja SKPD). |  |
| 4.  | Publikasi standar pelayanan terpadu satu pintu pada lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) | Diterbitkannya dan disosialisasikan Peraturan Kepala Daerah tentang pelimpahan kewenangan penerbitan izin dan non-izin di daerah kepada lembaga PTSP.  |  |

**Keterangan:**



: Selesai



: Dalam Proses Penyelesaian

# INOVASI PENGELOLAAN GERAKAN OGI

## A. Pembaruan jumlah dan anggota Tim Inti Open Government Indonesia



Pada tahun 2013 jumlah anggota Tim Inti OGI adalah 14 lembaga dari sebelumnya terdiri dari sembilan anggota. Terjadi penambahan anggota dengan pertimbangan:

1. Menjawab masukan OMS atas keterwakilan berimbang atas jumlah anggota tim inti
2. Mengakomodasi tantangan gerakan OG 2013 dan 2014 terutama menyangkut rencana penguatan di daerah
3. Tetap menjamin fleksibilitas pengelolaan tim inti
4. Keterwakilan sektor dan wilayah di Indonesia ke-14 organisasi ini bekerja dalam kedudukan yang setara dan memiliki suara yang sebanding dalam menentukan arah gerakan OGI.

Selain Tim Inti OGI, Gerakan OGI berjalan dengan dibantu oleh Sekretariat OGI yang memiliki 3 fungsi utama, yaitu manajemen program, manajemen media, dan manajemen hubungan pemangku kepentingan.

## B. Forum Pengetahuan dan Pemberdayaan OGI

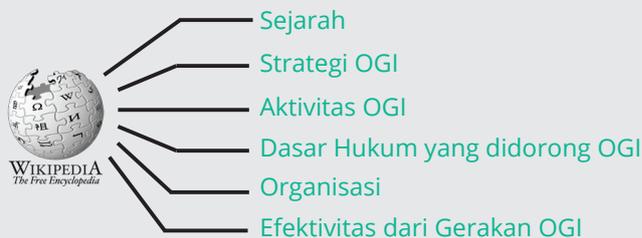
Beberapa aktivitas yang dilakukan:



Forum pengetahuan OGI turut menjadi sarana peningkatan kapasitas kementerian dan lembaga serta penjaga semangat gerakan OGI. Pada tahun 2013, dalam rangka meningkatkan pemahaman publik atas publikasi dokumen yang dilakukan kementerian/lembaga (K/L), maka dipandang perlu K/L dibekali kemampuan untuk menyederhanakan data dan informasi yang dimiliki K/L sehingga mudah dipahami publik. Forum pengetahuan tersebut diadakan dua kali dengan nama Lokakarya Infografis (*Infographic Workshop*). Lokakarya Infografis turut mendorong *citizen budget* (anggaran yang ramah baca bagi masyarakat serta mudah dipahami publik). Kegiatan ini dihadiri 153 peserta dari berbagai kementerian dan lembaga. Lokakarya infografis pertama diadakan di Gedung Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) yang dihadiri sebanyak 63 peserta dari 22 K/L.

Melihat antusiasme peserta dan kesuksesan kegiatan Lokakarya Infografis pertama, OGI membuat Lokakarya Infografis kedua pada 16 Desember 2013. Kali ini dihadiri sebanyak 153 peserta dari berbagai K/L. Lokakarya tersebut dibagi dalam dua sesi dimana sesi pertama diisi tentang penjelasan umum terkait infografis termasuk di dalamnya langkah-langkah yang harus dilakukan dalam membuat sebuah infografis, sedangkan sesi kedua diisi dengan praktik langsung pembuatan infografis.

## C. Wikipedia Open Government Indonesia



[http://id.wikipedia.org/wiki/Open\\_Government\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Open_Government_Indonesia)

Pada 2013, OGI memiliki laman tentang OGI di Wikipedia sehingga menjadi media informasi tambahan selain situs, newsletter dan media sosial yang dimiliki oleh OGI. Wikipedia OGI berisi sejarah, strategi OGI, aktivitas OGI, dasar hukum yang didorong OGI, organisasi dan efektivitas dari gerakan OGI.

## D. Pemantauan dan *debottlenecking* Renaksi OGI 2013

Setelah tercapai kesepakatan atas rencana aksi OGI 2013, maka pengawasan dilakukan atas pelaksanaannya. Pengawasan tersebut didasarkan atas pencapaian ukuran keberhasilan yang dilaporkan setiap enam bulan selama setahun. Hasil pengawasan disajikan dalam bentuk dokumen yang dinamai "Format 8 Kolom" yang berisi Rencana Aksi, Penanggung Jawab, Instansi Terkait, Kriteria Keberhasilan, Ukuran Keberhasilan, Ukuran Keberhasilan per 6 bulanan, Persen Capaian dan Keterangan. Format yang sederhana dan gamblang ini mempermudah anggota Tim Inti dan masyarakat untuk ikut memantau pencapaian Renaksi OGI 2013. Selain pengawasan, turut dilakukan aksi *debottlenecking* atau melepas sumbat atas hambatan pencapaian ukuran keberhasilan.

Salah satu *debottlenecking* yang berhasil signifikan adalah disepakatinya ruang lingkup tugas pendirian dan penguatan kapasitas PPID di pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tercapai kolaborasi antara dua kementerian yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). Dua kementerian tersebut yang akan menjadi tulang punggung terselenggaranya operasionalnya PPID hingga ke tingkat daerah. Kemdagri turut berperan aktif menyediakan petunjuk teknis atas operasionalnya PPID bekerjasama dengan Kemkominfo. Kemkominfo pun sepakat berperan aktif terhadap pendirian kelembagaan dan penguatan kapasitas layanan informasi di K/L pusat. Kemdagri sepakat berperan aktif terhadap pendirian kelembagaan PPID di pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota.

“Salah satu *debottlenecking* yang berhasil signifikan adalah disepakatinya ruang lingkup tugas pendirian dan penguatan kapasitas PPID di pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan tercapainya kolaborasi antara dua kementerian yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri)”

## **E. Kolaborasi Aktif Pihak Luar Pemerintah**

Pada tahun 2013, OGI berkolaborasi dengan berbagai pihak ke-3 melalui beberapa program, yaitu:

### **1. Peluncuran Hasil Indeks Open Budget untuk Kawasan ASEAN**

OGI bekerja sama dengan Seknas FITRA yang turut didukung oleh International Budget Partnership (IBP) bersama negara-negara ASEAN menyelenggarakan diskusi bertema “Membangun Keterbukaan Fiskal dan Peluncuran Hasil Open Budget Indeks untuk Kawasan ASEAN”.

### **2. Model Open Government Partnership (MOGP)**

MOGP diselenggarakan dengan didukung oleh berbagai pihak dari Universitas Paramadina, juri dengan berbagai macam latar belakang, K/L, donor (Ford Foundation dan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta). Masing-masing mengambil peran dalam mendukung terselenggaranya acara ini dari lokasi penyelenggaraan acara hingga hadiah bagi pemenang.

### **3. E-Transparency Award**

Universitas Paramadina memiliki inisiatif untuk memberikan penilaian atas tampilan situs serta perbaikan atas situs dari K/L pemerintah pusat. Situs K/L merupakan gerbang utama menuju transparansi informasi dan layanan. OGI mendukung diselenggarakannya acara ini karena memberikan peningkatan kapasitas bagi K/L memperbaiki situs, apresiasi terhadap inovator di pemerintahan juga untuk menjaga momentum keterbukaan di K/L.

### **4. Pemegang Open Government Indonesia**

Sekretariat OGI didukung oleh pemegang dan relawan yang berdedikasi melalui gerakan OGI dan menjadi agen-agen penyebar prinsip-prinsip OGI sejak 2012. Selama 2013 pemegang yang telah bergabung berjumlah 22 orang terbagi di 4 batch. Pemegang dan relawan tersebut membantu di kanal media komunikasi, rencana aksi, desain, analisis dokumen dan berbagai kegiatan OGI selama tahun 2013.

### **5. Formulasi Renaksi OGI 2013**

Dalam formulasi Renaksi OGI 2013, selain melalui proses FGD, pihak swasta turut serta membantu secara independen. Boston Consulting Group (BCG) membantu evaluasi capaian Renaksi OGI 2012 kemudian meramu poin utama yang sebaiknya dicapai dalam Renaksi OGI 2013 berdasar pada hasil kajian BCG.

### **6. Satu Pemerintah**

Satu Pemerintah menjadi portal yang menyajikan informasi tentang profil lembaga hingga transparansi anggaran. Dalam pembangunannya Satu Pemerintah selain didukung oleh pemegang turut dibantu oleh tim dari Microsoft.

### **7. SOLUSIMU**

Penyelenggaraan kontes inovasi SOLUSIMU sebagai instrumen yang membuka kesempatan masyarakat memberikan solusi bagi pembangunan Indonesia didukung oleh berbagai pihak dari akademisi, profesional, OMS, praktisi, media dan K/L. SOLUSIMU turut dibantu pihak DBrandcom dalam penyelenggaraan roadshow hingga malam penghargaan.

# PERLUASAN OGI DI TAHUN 2014-2015

## KEGIATAN KEPEMIMPINAN INDONESIA DALAM OGP

### A. TANTANGAN IMPLEMENTASI GERAKAN OGI DI MASA MENDATANG

Terdapat beberapa tantangan nyata yang dapat menghadang dan bahkan mengancam kesinambungan implementasi gerakan OGI, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

#### a.1 Kondisi dan Kapasitas Badan Publik (K/L/Pemda) Rentan Berubah

Secara umum, diakui bahwa kunci partisipasi khususnya K/L selama ini lebih pada hubungan informal dibandingkan dengan kekuatan formal yang ada. Gerakan OGI sangat tergantung pada pelaksanaan oleh orang yang tepat di waktu yang tepat baik secara jabatan, wewenang, kompetensi dan komitmen. Para juara gerakan OGI di K/L yang tersebar mayoritas merepresentasikan hal tersebar dari pejabat eselon II, III, IV, non-staf, bahkan pegawai honorer sekalipun.

Akibatnya, kinerja OGI di internal K/L/Pemda yang bergantung tinggi terhadap pegawai dimaksud sangat rentan terhadap proses mutasi birokrasi yang berlaku di Indonesia. Pemerintah RI secara paralel dalam program reformasi birokrasi berinovasi, salah satunya agar ketergantungan bukan kepada orang per orang namun terhadap lembaga.

#### a.2 Keterpaduan Antar Pemangku Kepentingan OGI Secara Utuh Belum Cukup Kuat

Keberhasilan implementasi OGI membutuhkan kerjasama erat antar beragam pemangku kepentingan yaitu : K/L/Pemda, OMS, Akademisi, Sektor Swasta, Generasi Muda, dan Media. Walaupun terdapat organisasi Tim Inti yang diharapkan memudahkan komunikasi antar anggota tim inti ternyata tetap dibutuhkan sekretariat khusus OMS untuk mengelola kontribusi dan partisipasi OMS secara nasional dan internasional. Namun demikian, bobot kepesertaan OMS yang cukup tinggi belum diikuti oleh bobot kepesertaan sektor lainnya. Hal ini diakui karena sektor diluar OMS belum secara khusus digarap, dengan demikian peran sektor lain belum tampak mewarnai dalam gerakan OGI . Untuk itu sengaja pada tahun 2013 dilakukan langkah khusus untuk menghadirkan peran Generasi Muda dan dirancang 2014 perluasan ke sektor swasta.

#### a.3 Kepemilikan Publik atas OGI Belum Cukup Menyentuh Publik

Sesuai dengan kritik laporan evaluasi implementasi OGI dari OMS Independen tahun 2012, laporan *Independent Report Mechanism* (IRM) serta hasil kajian BCG bahwasanya kehadiran gerakan OGI belum sepenuhnya menyentuh publik. Isu utama kritik dimaksud menyangkut : (i) terlalu mengandalkan pemanfaatan situs/teknologi sistem informasi, (ii) kurangnya promosi/ kampanye publik serta (iii) kurangnya memperjuangkan hak informasi publik sebagaimana Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

### B. FOKUS 2014-2015

#### b.1 Mempertahankan Kepemilikan Bersama atas Program OGI

Melewati tahun 2011 dan 2012, OGI berkuat pada peningkatan kesadaran masyarakat atas gerakan OGI beserta perluasan prinsip-prinsip OGI yang kemudian pada 2013 ditingkatkan menjadi peningkatan rasa kepemilikan atas gerakan OGI. Keberlanjutan semangat OGI diharapkan menjadi praktik dalam keseharian masyarakat Indonesia. Dimulai dengan keberhasilan atas keberanian masyarakat menguji akses atas hak informasi yang diperluas dengan memberikan solusi atas permasalahan layanan publik. Tingkat uji akses oleh *public*, kasus sengketa informasi di Komisi Informasi sedikit banyak menjadi pertanda mulai munculnya sadarnya masyarakat atas hak mendapat informasi. Selain itu, pemberian solusi dari masyarakat telah dimulakan dengan penyelenggaraan SOLUSIMU yang dalam tahap awal dilanjutkan oleh K/L terkait.

Gerakan OGI adalah baik untuk semua (baik untuk pemerintah maupun masyarakat), dan oleh karenanya perlu dibangun dan dilaksanakan bersama-sama tanpa saling menunggu. Agar gerakan OGI dapat lebih harmonis dan serempak, manfaatnya terasa sampai ke pelosok daerah, diperlukan **jaringan kolaborasi dan komunikasi yang kokoh** antar berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, swasta, OMS, academia, generasi muda) baik di pusat dan di daerah. Fleksibilitas dan dinamika gerakan OGI perlu selalu dijaga tidak hanya oleh pemerintah namun juga oleh berbagai pemangku kepentingan OGI yang lain.

## **b.2 Menjaga Momentum Keketuaan Utama OGP**

Di tingkat global, Indonesia menjadi Ketua Utama OGP sejak Oktober 2013-September 2014, bersama dengan Mexico sebagai Ketua Pendukung OGP. Sebagai Ketua Utama OGP, Indonesia perlu secara konsisten dan ambisius dalam mengimplementasikan komitmen OGP sehingga menjadi contoh bagi negara peserta OGP. Tema utama aksi keketuaan Indonesia dalam OGP adalah partisipasi publik, maka Indonesia fokus memperluas gerakan OGI khususnya menyangkut penyiapan infrastruktur transparansi dan partisipasi publik hingga tingkat daerah, melalui:

- i. Perluasan implementasi solusi OGI seperti LAPOR, *Open Data*, *Open Budget* ke tingkat di daerah
- ii. Perluasan dan penguatan jaringan PPID di daerah
- iii. Pelibatan OMS di tingkat daerah

## **b.3 Perluasan Keterlibatan Kaum Muda**

Selain perluasan ke daerah, Indonesia berkomitmen kuat meningkatkan keterlibatan kaum muda menyadari potensi bonus demografi Indonesia serta terus menciptakan efek bola salju melalui jaringan pemuda. Pada tahun 2014-2015, direncanakan duplikasi dan pelaksanaan MOGP di Indonesia melalui penyebaran penyelenggaraan di kampus-kampus. MOGP di tingkat global dilaksanakan pertama kali di Indonesia dan pada tahun 2014-2015 direncanakan diduplikasi di berbagai negara.

## **b.4 Pelibatan Swasta melalui Pendirian Tim Inti Sektor Swasta dan Tim Sekretariat Sektor Swasta**

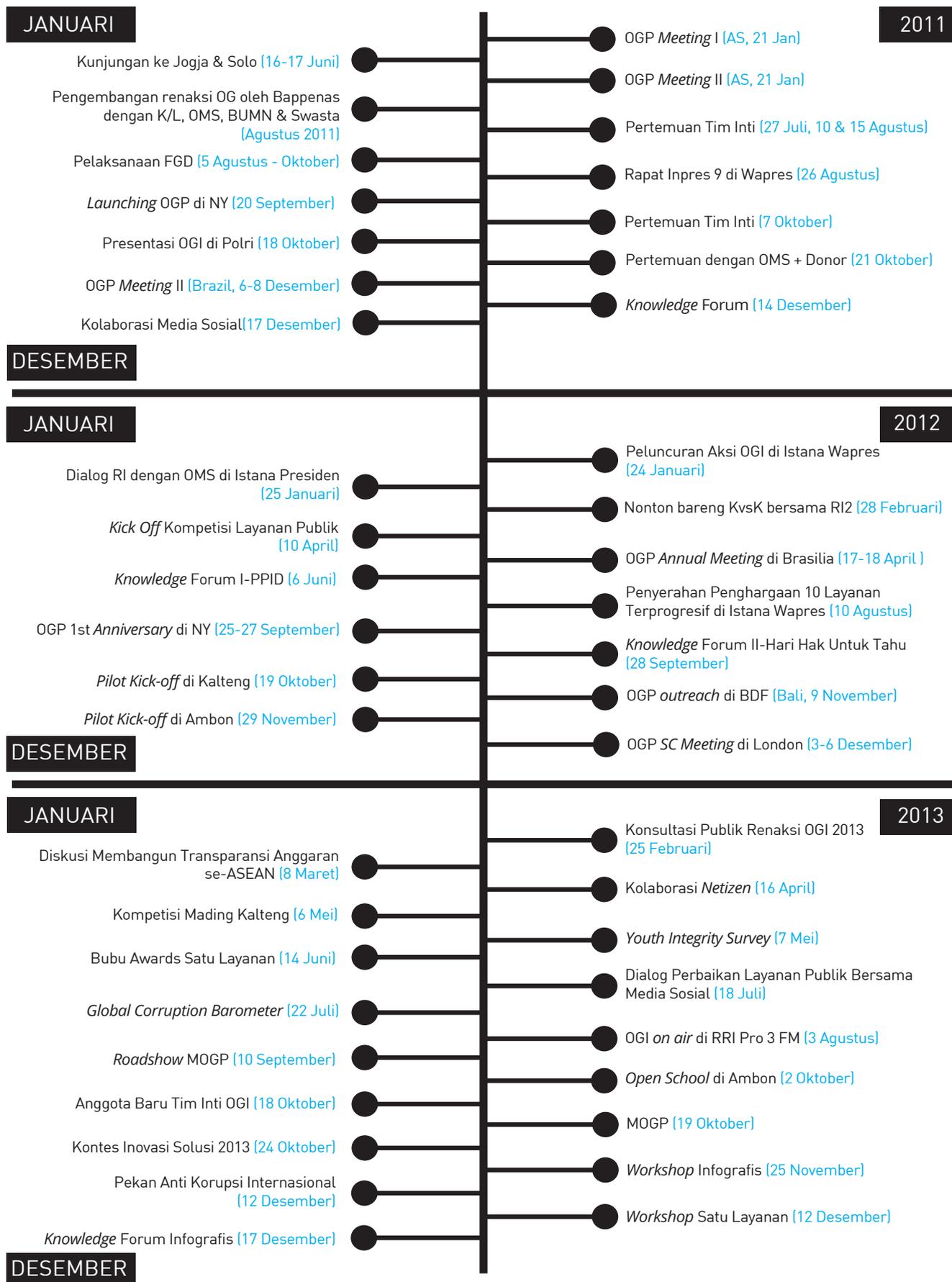
Pada tahun 2014-2015, OGI akan fokus pada pelibatan aktif pihak swasta sehingga pihak swasta tidak hanya menjadi objek namun subyek dalam berbagai program OGI. Pendirian Tim Inti Sektor Swasta beserta sekretariatnya dimulakan agar menjadi kontak utama untuk kemudahan keberlanjutan komunikasi atas program OGI yang melibatkan pihak swasta. Keberlanjutan program dipastikan dengan penetapan beberapa renaksi sebagai capaian tercepat sektor swasta.

## **b.5 Penganjangan Hari Hak untuk Tahu sebagai Hari Keterbukaan Pemerintah**

Tanggal 28 September dikenal oleh dunia internasional sebagai hari Hak untuk Tahu (*Right To Know Day*). Untuk terus menjaga momentum arti penting keterbukaan dalam menjalankan demokrasi yang bertanggung jawab, apresiasi terhadap keterbukaan pemerintah dapat dilakukan setiap tanggal 28 September oleh Kepala Negara. Hingga tahun 2013 inisiasi hak untuk tahu selalu dilakukan oleh Kemkominfo dan OMS, sehingga dengan apresiasi dari Kepala Negara meningkatkan gaung Keterbukaan di seluruh negeri Indonesia yang terdiri dari 13.466 pulau membentang layaknya timur ke barat negara Amerika Serikat.

# LAMPIRAN

## 1. Tonggak-Tonggak Penting dalam Perjalanan OGI



## 2. Berbagai Kegiatan OGI

### 2.a Kontes Inovasi Solusi 2013



Lokasi Roadshow SOLUSIMU

Kontes Inovasi Solusi 2013 dengan tema “SOLUSIMU, Ayo Berinovasi!” merupakan kesempatan bagi publik untuk berkarya dengan memberikan solusi yang inovatif dalam bentuk ide—mulai dari strategi hingga implementasinya—dan infografis (penyajian data/informasi publik untuk komunikasi yang efektif kepada publik). Ide inovasi dikirimkan oleh setiap individu maupun kelompok—tidak dibatasi jumlah anggotanya—mulai 17 Oktober hingga 6 Desember 2013 baik melalui [www.solusimu.org](http://www.solusimu.org) ataupun formulir cetak yang disediakan saat diadakan kegiatan sosialisasi di 10 kota di Indonesia. Acara puncak dilaksanakan pada 9 Januari 2014 mencakup tiga agenda utama, yaitu penjurian final kontes karya inovasi, pameran karya solusi, dan penganugerahan pemenang. Pemenang utama mendapat apresiasi berupa tiket perjalanan wisata ke Raja Ampat. Nama-nama pemenang beserta karyanya dapat dilihat dan diunduh melalui website [www.solusimu.org](http://www.solusimu.org) atau menghubungi Sekretariat OGI.

Kini waktunya publik bersolusi lebih lantang dan pemerintah bersiap mendengar juga menjalankannya. Harapannya, publik tidak hanya berhenti untuk mengeluh tapi memberikan juga solusi, dan pemerintah (K/L) berkomitmen untuk menjalankannya sesuai dengan kewajibannya melayani.



Para pemenang berfoto dalam acara puncak penganugerahan karya ide inovasi solusi 2013 terbaik

## 2.b Model Open Government Partnership (MOGP)

MOGP merupakan replikasi dari gerakan Open Government Partnership (OGP), sebuah gerakan yang bertujuan untuk membangun komitmen negara-negara anggotanya agar lebih transparan, partisipatif, akuntabel dan mendorong peningkatan kualitas layanan publik bagi masyarakatnya. Pada tahun 2013 OGP memiliki 63 negara anggota dimana Indonesia menjadi ketuanya.



Roadshow MOGP yang dilakukan di 6 kampus sekaligus, yaitu ITB, Unpar, Unair, UPH, UNHAS dan UI selama periode 30 Agustus hingga 3 September 2013

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan inisiatif dan prinsip-prinsip pemerintah terbuka secara umum kepada generasi muda dan mendorong pemuda memahami pentingnya terlibat dalam membangun pemerintahan yang lebih terbuka.

Selama dua hari, 4-5 Oktober 2013, 40 pelajar dan mahasiswa se-Indonesia yang terpilih dari 200-an pendaftar mengikuti kegiatan MOGP berupa konferensi, yang selanjutnya pada 31 Oktober – 1 November 2013, pelajar/mahasiswa yang dinilai terbaik dari konferensi ini diberangkatkan ke London untuk mengikuti *OGP Annual Summit*. Empat pelajar/mahasiswa terpilih tersebut antara lain: Fahmi Islami dan Hanifah Ahmad dari Universitas Indonesia, Depok; Zakia N. Syifa dari Universitas Airlangga, Surabaya; Biondi Sanda dari Universitas Hasanuddin, Makassar.

## 2.c Forum Pengetahuan

Forum pengetahuan adalah wadah sosialisasi dan diskusi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang OGI dan meningkatkan pengetahuan aktor-aktor keterbukaan dalam melaksanakan keterbukaan pemerintah. Forum pengetahuan diselenggarakan tiga kali dalam satu tahun. Tema forum pengetahuan selalu berbeda-beda pada setiap pelaksanaannya

### 2.c.1 Forum Pengetahuan: Workshop Infografis I



Peserta *workshop* yang berjumlah 63 peserta dari berbagai K/L tengah menyimak pelatihan *workshop* Infografis di gedung UKP-PPP

Pada tanggal 18 November 2013 lalu, OGI mengadakan sebuah Forum Pengetahuan dengan tema “*Workshop Infografis*”. Kegiatan yang dilakukan di Gedung Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) Ini bertujuan memberikan pelatihan kepada perwakilan Kementerian/Lembaga agar mampu menyajikan data-data pemerintah dalam bentuk yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat.

### 2.c.2 Forum Pengetahuan: *Workshop Infografis II*



Suasana gedung Krida Bhakti saat dilaksanakan kegiatan Forum Pengetahuan; *Workshop Infografis II* yang diikuti 153 peserta dari berbagai K/L

Forum Pengetahuan II yang masih bertemakan *workshop infografis* kembali diadakan pada 16 Desember 2013 melanjutkan keberhasilan *workshop I* yang disambut baik dan antusias dari peserta di forum pengetahuan sebelumnya. Infografis adalah representasi visual informasi, data atau ilmu pengetahuan secara grafis. Infografis dapat memperlihatkan informasi rumit dengan singkat dan jelas, sehingga informasi lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Instrumen ini diharap mampu meningkatkan pemahaman masyarakat dan meningkatkan fungsi dari pelaksanaan transparansi anggaran oleh pemerintah, sebagaimana contoh APBN-P 2013, Infografis APBD Ambon dan Kalimantan Tengah.

### 2.c.3 Forum Pengetahuan: *Workshop Satu Layanan*

Forum Pengetahuan yang dilaksanakan pada 10 Desember 2013, berupa *workshop* dengan tema “Asistensi Promosi Informasi Layanan Kementerian/Lembaga Melalui Portal Satu Layanan.net”. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi-informasi layanan publik dalam satu wadah berupa sebuah portal yaitu [satulayanan.net](http://satulayanan.net) sehingga masyarakat menjadi lebih mudah menemukannya karena sumber informasinya terpusat.



Suasana *workshop* yang diikuti oleh 47 peserta dari berbagai K/L di kantor Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)

Yang menarik dari *workshop* ini adalah bahwa peserta selain mendapatkan penjelasan dan pemahaman tentang pentingnya menyediakan informasi layanan publik yang mudah diakses dan dipahami masyarakat, juga diwajibkan secara langsung melakukan simulasi pembuatan modul informasi layanan publik untuk dipublikasikan di portal satulayanan.net. Peserta berhasil membuat 19 modul informasi layanan publik tambahan yang langsung dipublikasikan di portal satulayanan.net di akhir *workshop*.

## 2.d Pekan Anti Korupsi Internasional



Pekan Anti Korupsi yang diadakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Istora Senayan pada 9-11 Desember 2013 dalam memperingati Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI)

## 2.e Diskusi OGI

### 2.e.1 Konsultasi Renaksi OGI 2013



Pemaparan Renaksi OGI dilakukan oleh Dedi N. Cahyanto (Asisten Kepala UKP-PPP) di di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta, pada 13 Februari 2013. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapat masukan renaksi OGI di tahun 2013. Partisipan yang diundang adalah BUMN, akademisi dan pegiat Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)

## 2.e.2 Membangun Transparansi Anggaran di Asia Tenggara



Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan menjadi salah satu sesi diskusi acara peluncuran *Open Budget Survey 2012* oleh IBP dan Fitra

Diskusi bertema “Membangun Keterbukaan Fiskal dan Peluncuran Hasil Indeks Open Budget untuk Kawasan ASEAN” yang dilaksanakan pada 26-27 Februari 2013 di Hotel Aryaduta Jakarta ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman dalam hal keterbukaan fiskal dan partisipasi masyarakat baik oleh pejabat pemerintah maupun OMS seluruh ASEAN. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 90 peserta dari 10 negara ASEAN, Korea Selatan, dan perwakilan dari Bank Dunia, Ford Foundation, dan World Wide Web Foundation.

## 2.e.3 Dialog Pegiat Media Sosial



Pada tanggal 16 Juli 2013, Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto, berfoto bersama setelah mengadakan dialog dengan *Internet Citizen* (Netizen) untuk mendiskusikan solusi perbaikan layanan publik. Acara diskusi dan buka puasa bersama yang diikuti oleh puluhan *influencer* media sosial di hotel Le Meridien Jakarta ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dari *influencer* media sosial dalam hal perbaikan layanan publik.

## 2.f Aktivitas Daerah



Salah satu Mading yang dibuat oleh peserta kompetisi

Kompetisi Mading yang bertema "Transparansi BOS di Sekolahku" ini diikuti oleh 32 sekolah tingkat SMP dan SMA. Kegiatan ini bertujuan mendorong partisipasi publik untuk peduli dan tanggap terhadap penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

### 2.f.1 Provinsi Kalimantan Tengah

- **Kompetisi Mading**



Salah satu peserta yang tengah mempresentasikan hasil karya mading mereka



Tim Jasin dari SMAN 2 Palangkaraya mewawancarai perwakilan guru mengenai BOS terkait Kompetisi Mading *Open School*

- **Penerimaan Siswa Online**



Situs Penerimaan Siswa Online di Palangkaraya



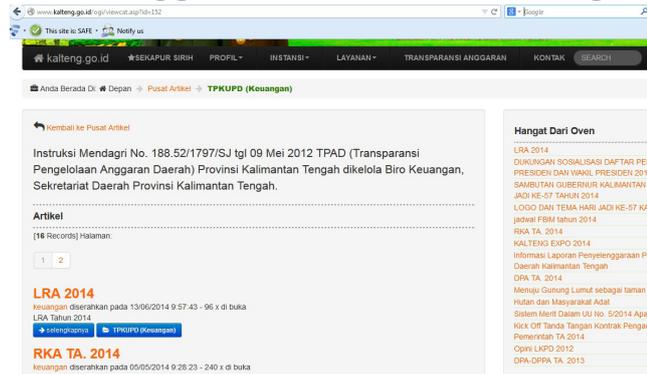
Situs Penerimaan Siswa Online di Kotawaringin Barat



Situs Penerimaan Siswa Online di Kotawaringin Timur

Pelaksanaan *Open School* juga dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Tengah salah satunya melalui Penerimaan Siswa Online atau Penerimaan Peserta Didik Baru Online (PPDB Online) yang difokuskan terlebih dahulu di 1 Ibukota Provinsi yaitu Kota Palangkaraya dan 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Kotawaringin Barat. Sistem PPDB *Online* memudahkan orang tua dan murid untuk memantau hasil final pilihan sekolah, mengurangi suap dan tanpa birokrasi panjang.

- **Transparansi Anggaran Kalimantan Tengah**



Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dipublikasikan melalui situs

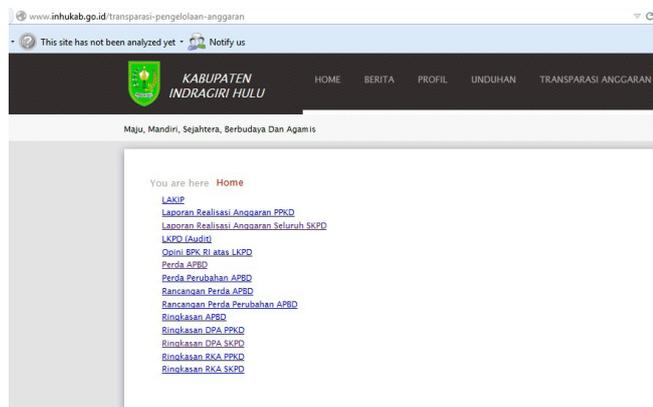
Sebagai bentuk komitmen atas *Open Budget* atau keterbukaan anggaran, Pemerintah Kalimantan Tengah mempublikasi berbagai dokumen anggaran baik rancangan, dokumen final dan dokumen hasil audit milik Kalimantan Tengah secara *online*. Berbagai publikasi tersebut agar masyarakat dapat mengetahui manfaat penggunaan anggaran Kalimantan Tengah dan memberikan masukan untuk penggunaan anggaran yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Kalimantan Tengah.

- **Pembentukan PPID Provinsi Kalimantan Tengah**

Pelaksanaan UU KIP dinyatakan di daerah percontohan dengan pembentukan PPID Provinsi Kalimantan Tengah beserta PPID Pembantu Kalimantan Tengah. Selanjutnya PPID memerlukan POS dan Daftar Informasi Publik untuk diterbitkan sehingga bisa menjadi acuan bagi publik ketika meminta data/informasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

## 2.f.2 Kabupaten Indragiri Hulu

- **Transparansi Anggaran Indragiri Hulu**



Berbagai data anggaran diunggah ke situs Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu

Sebagai bentuk komitmen atas *Open Budget* atau keterbukaan anggaran, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu mempublikasi berbagai dokumen anggaran baik rancangan, dokumen final dan dokumen hasil audit milik Indragiri Hulu secara *online*. Berbagai publikasi tersebut agar masyarakat dapat mengetahui manfaat penggunaan anggaran Indragiri Hulu dan memberikan masukan untuk penggunaan anggaran yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Indragiri Hulu.

- **Aktivasi PPID**

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu berkomitmen dalam penuntasan PPID dengan mengaktifkan PPID melalui pembuatan dokumen POS dan Daftar Informasi Publik (DIP). Pembuatan dokumen POS dan DIP didukung pelatihan oleh OMS yaitu PATTIRO dan FITRA hingga menelurkan Sistem Informasi Publik di <http://inhukab.sip-ppid.net/document>.

- **Bergabungnya Indragiri Hulu dengan LAPOR!**

LAPOR! adalah salah satu inisiatif pengaduan layanan publik dan kanal penyaluran aspirasi dari masyarakat yang telah diapresiasi khalayak publik. Pada tahun 2013, Pemerintah Kota Jakarta dan Pemerintah Kota Bandung menyatakan bergabung dengan LAPOR!. Pelaporan dapat dilaksanakan melalui sms ke 1708 dan situs LAPOR!.

- **Call Center Puskesmas aktif 24 jam**

Puskesmas sebagai pusat kesehatan masyarakat yang tersedia hingga level kecamatan bahkan hingga desa merupakan garda kesehatan pertama apabila terjadi kebutuhan akan layanan kesehatan. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu menyediakan *call center* di setiap puskesmas Indragiri Hulu sehingga dapat dihubungi dalam keadaan darurat dan kemudahan mengakses 12 ambulans yang tersedia di Indragiri Hulu.

### 2.f.3 Kota Ambon

- **Transparansi Anggaran Kota Ambon**



Pemerintah Kota Ambon memudahkan akses atas transparansi anggaran Ambon melalui situs [ambon.go.id](http://ambon.go.id)

Sebagai bentuk komitmen atas *Open Budget* atau keterbukaan anggaran, Pemerintah Kota Ambon mempublikasi berbagai dokumen anggaran baik rancangan, dokumen final dan dokumen hasil audit milik Ambon secara *online*. Berbagai publikasi tersebut agar masyarakat dapat mengetahui manfaat penggunaan anggaran Ambon dan memberikan masukan untuk penggunaan anggaran yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Ambon. Informasi tersebut turut disertai dengan *citizen budget* atau informasi ramah baca agar lebih banyak masyarakat paham tentang anggaran Kota Ambon.

- **PPID Kota Ambon**



Informasi tentang PPID diunggah ke situs [www.ambon.go.id](http://www.ambon.go.id)

Pelaksanaan UU KIP dinyatakan di daerah percontohan dengan pembentukan PPID Kota Ambon beserta PPID Pembantu Kota Ambon. Selanjutnya, PPID memerlukan POS dan Daftar Informasi Publik untuk diterbitkan sehingga bisa menjadi acuan bagi publik ketika meminta data/informasi kepada Pemerintah Kota Ambon.

- **Open School Kota Ambon**



Publikasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di situs [www.ambon.go.id](http://www.ambon.go.id)

Pelaksanaan *Open School* juga dilaksanakan di Kota Ambon salah satunya melalui publikasi BOS secara *online* dan terpasang di sekolah-sekolah penerima BOS.

### 3. Anggota Baru Tim OGI

Pada 14 September 2013 resmi 3 OMS yaitu GeRAK Aceh, JARI Indonesia, dan KOPEL Makassar sebagai Tim Inti OGI baru. Dengan terpilihnya 3 OMS baru ini, genaplah jumlah Tim Inti OGI yang terdiri dari 14 organisasi, yakni 7 dari pemerintah dan 7 dari OMS. Keempat belas organisasi ini bekerja dalam kedudukan yang setara dan memiliki suara yang sebanding dalam menentukan arah OGI.



| PEMERINTAH  | ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)</li> <li>• Kementerian Luar Negeri (Kemlu)</li> <li>• Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo)</li> <li>• Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)</li> <li>• Komisi Informasi Pusat (KIP)</li> <li>• Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri)</li> <li>• Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemPANRB)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transparency International Indonesia (TII)</li> <li>• Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA)</li> <li>• Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro)</li> <li>• Indonesia Center for Environmental (ICEL)</li> <li>• GeRak Aceh</li> <li>• JARI Indonesia</li> <li>• KOPEL Makassar</li> </ul> |

#### 4. Portal Satu Layanan

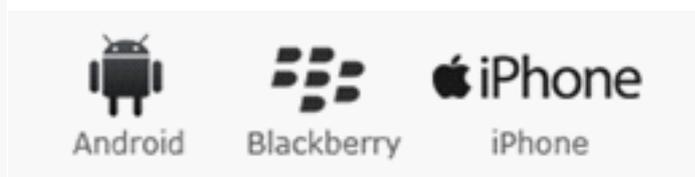


Portal SatuLayanan ([satulayanan.net](http://satulayanan.net)) pada tahun 2013 berisi informasi lebih dari 190 layanan publik yang dikunjungi hingga 9.000 pengguna per hari. SatuLayanan telah memiliki aplikasi selular yang tersedia di *Google Play* dan *Apple App Store*.



SatuLayanan pada Juni 2013 telah berhasil memperoleh penghargaan Bubu Awards v.08 untuk kategori Pemerintah Bubu Awards adalah sebuah penghargaan prestisius dunia digital di Indonesia

#### 5. Portal LAPOR!



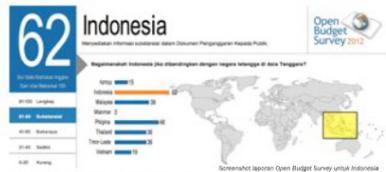
Portal LAPOR! di [lapor.ukp.go.id](http://lapor.ukp.go.id) adalah portal dimana masyarakat bisa melaporkan keluhan masyarakat dan bisa cek tindak lanjut yang telah dilakukan. LAPOR! sudah terhubung ke Jakarta dan Bandung pada akhir 2013

# 6. Media Komunikasi OGI

## 6.a Newsletter OGI

Newsletter OGI dihasilkan setidaknya setiap triwulan dengan tema yang berbeda. Edisi Maret 2013 mengangkat tentang "Skor Transparansi Anggaran Indonesia Terbaik se-Asia Tenggara", kemudian edisi Mei 2013 mengangkat tentang "Skor Sempurna untuk Indonesia", diakhiri edisi September 2013 yang mengangkat tentang "MOGP: Merangkul Kaum Muda Indonesia dalam Era Keterbukaan".

The cover features the OGI logo and the title "Skor Transparansi Anggaran Indonesia Terbaik se-Asia Tenggara". It also includes the subtitle "Era Birokrasi Tertutup Telah Usai, Daerah Wajib Memiliki PPID".



### Skor Transparansi Anggaran Indonesia Terbaik se-Asia Tenggara

International Budget Partnership (IBP) telah merilis Open Budget Survey 2012 pada tanggal 23 Januari 2013 di London, Inggris. Dari 100 negara diseluruh dunia yang disurvei, Indonesia mendapat skor Open Budget Index (OBI) 62 dan menempati posisi ke 20 negara dengan anggaran paling transparan di seluruh dunia. Skor 62 ini juga menempatkan Indonesia menjadi negara yang paling transparan dalam hal anggaran di Asia Tenggara.

Open Budget Survey merupakan sebuah survei data tahunan yang melibatkan 100 negara untuk menilai seberapa jauh transparansi dalam hal anggaran. Survei keterbukaan anggaran ini menilai apakah pemerintah suatu negara telah mempublikasikan informasi kunci mengenai anggaran untuk dibuatkan sebagai patokan.

Tahun 2012 ini Indonesia mendapatkan nilai 62, yang artinya mendapat skor lebih tinggi dari "good". Nilai ini meningkat dari tahun 2010, yaitu 60. Nilai Indonesia ini lebih tinggi dari skor negara-negara Asia.

Nilai 62 membuat Indonesia menjadi salah satu dari 23 negara yang tergolong transparan dalam penyediaan informasi anggaran secara substansial. Indonesia berada di peringkat ketiga di kawasan Asia di bawah Korea Selatan dan India. Nilai ini juga membuat Asia lebih tinggi dalam peringkat survei tersebut yang dilakukan oleh IBP terhadap Indonesia.

Dari peringkat negara yang disurvei, 77 negara dinyatakan telah mencapai batas nilai 60 yang berarti sudah memenuhi informasi yang memadai dalam hal anggaran. Nilai tertinggi diraih oleh Belanda yang dengan angka 93 karena dinilai telah memberikan yang paling baik. Negara lain untuk skor 60 dalam proses pemantauan anggaran.

Dari delapan dekumen anggaran kumulatif yang dipantau oleh IBP untuk menilai apakah sebuah negara tergolong transparan dalam penyediaan informasi dan pertanggungjawaban.

Open Government Indonesia Newsletter 2

The agenda lists three main events: 1. Governance & Leadership Strategic Meeting on Feb 29, 2013; 2. Open Budget Index Launch on Feb 27, 2013; and 3. Launching Kegiatan Pilot Project Kalteng on March 14, 2013. It also includes a map of Kalimantan Tengah.

This section is titled "Publik Berbicara" and lists several speakers including Eka Dwiarta, Agus Supriyanto, and others, along with their respective organizations.

The map highlights countries like Canada, Korea Selatan, Filipina, Brazil, and Indonesia, with text boxes describing their OGI initiatives and achievements.

The report discusses the importance of Public Information Disclosure (PPID) for government agencies, citing the success of the LAPORI portal and the need for all agencies to have their own PPID systems.

A "Tahukah Anda?" section containing several interesting facts and statistics related to the Open Government Partnership and the LAPORI portal.

A section titled "OGI Tweet" featuring a tweet from @OpenGovIndo that discusses the importance of transparency and public participation in budgeting.

A "Trivia Games" section with a list of five questions and their corresponding answers, testing knowledge about OGI and government transparency.

Edisi Maret 2013 mengangkat tentang "Skor Transparansi Anggaran Indonesia Terbaik se-Asia Tenggara"

### PPID KOTA AMBON DIJADIKAN ROLE MODEL PPID SE-INDONESIA

Peringkat pertama kota Ambon dalam kategori ini adalah sebagai role model di Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis oleh Komisi Informasi RI, Kota Ambon meraih skor tertinggi dengan nilai 95,5. Kota Ambon meraih skor tertinggi dengan nilai 95,5. Kota Ambon meraih skor tertinggi dengan nilai 95,5.

Peringkat pertama kota Ambon dalam kategori ini adalah sebagai role model di Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis oleh Komisi Informasi RI, Kota Ambon meraih skor tertinggi dengan nilai 95,5. Kota Ambon meraih skor tertinggi dengan nilai 95,5.

Peringkat pertama kota Ambon dalam kategori ini adalah sebagai role model di Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis oleh Komisi Informasi RI, Kota Ambon meraih skor tertinggi dengan nilai 95,5. Kota Ambon meraih skor tertinggi dengan nilai 95,5.

## tweet

2013-06-03 10:00:00

Peringkat pertama kota Ambon dalam kategori ini adalah sebagai role model di Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis oleh Komisi Informasi RI, Kota Ambon meraih skor tertinggi dengan nilai 95,5. Kota Ambon meraih skor tertinggi dengan nilai 95,5.

### Trivia Games

1. Angkor Wat yang merupakan bangunan bersejarah adalah...
2. Pada pemerintah mana saja terdapat istilah Menteri Kabinet...
3. Berapakah jumlah provinsi Indonesia saat ini...
4. Untuk menguji tingkat kecerdasan logika dan kemampuan berhitung...
5. Jumlah penduduk tertinggi di dunia saat ini adalah...

OPEN GOVERNMENT INDONESIA

1 PEMERINTAH

LAPORI

# OGI

NEWSLETTER

OPEN GOVERNMENT INDONESIA

SKOR  
SEMPURNA  
UNTUK  
INDONESIA

PPID KOTA AMBON SUKSES SEBAGAI ROLE MODEL PPID SE-INDONESIA

## SKOR KELAYAKAN INDONESIA SEMPURNA

16

16 negara yang telah mencapai skor sempurna dalam indeks kelayakan Indonesia. Negara-negara tersebut adalah: Singapura, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Australia, Selandia Baru, Kanada, Norwegia, Islandia, Finlandia, Swedia, Denmark, Belanda, Jerman, Prancis, dan Inggris.

16 negara yang telah mencapai skor sempurna dalam indeks kelayakan Indonesia. Negara-negara tersebut adalah: Singapura, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Australia, Selandia Baru, Kanada, Norwegia, Islandia, Finlandia, Swedia, Denmark, Belanda, Jerman, Prancis, dan Inggris.

## SEPAKAT SATUKAN KANAL ADUAN MASYARAKAT

Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara lembaga-lembaga yang menangani keluhan masyarakat.

Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara lembaga-lembaga yang menangani keluhan masyarakat.

Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara lembaga-lembaga yang menangani keluhan masyarakat.

## PORTAL KETERBUKAAN DI BERBAGAI NEGARA

NETIZEN:  
KOLABORASI  
MENDORONG  
KETERBUKAAN

Peran netizen dalam mendorong keterbukaan informasi publik di berbagai negara.

Peran netizen dalam mendorong keterbukaan informasi publik di berbagai negara.

Peran netizen dalam mendorong keterbukaan informasi publik di berbagai negara.

Edisi Juni 2013 mengangkat tentang "Skor Sempurna Untuk Indonesia"



## 6.b Radio



Pada hari Kamis, 2 Agustus 2013, perwakilan dari 3 peserta Kompetisi *Open Government* diundang hadir ke RRI Pro 3 FM untuk berdiskusi tentang *Open Government*

## 7. Program Magang



*Internship OGI batch III* dilaksanakan pada Januari-Februari 2013



*Internship OGI batch IV* dilaksanakan pada April-Juni 2013



*Internship OGI batch V* dilaksanakan pada Juli-Oktober 2013



*Internship OGI batch VI* dilaksanakan pada Oktober 2013-Januari 2014

## 8. Tautan ke Portal-Portal Penting



<http://opengovindonesia.org/>



<http://www.opengovpartnership.org/>



<http://satulayanan.net/>



<http://satupemerintah.net/>

**Geospasial untuk Negeri**

<http://tanahair.indonesia.go.id/>



<http://lapor.ukp.go.id/>



<http://twitter.com/opengovindo>



<http://data.ukp.go.id>

 [www.opengovindonesia.org](http://www.opengovindonesia.org)

 [blog.opengovindonesia.org](http://blog.opengovindonesia.org)

 [@OpenGovIndo](https://twitter.com/OpenGovIndo)

 [OpenGovIndonesia](https://www.youtube.com/OpenGovIndonesia)

 [OpenGovernmentIndonesia](https://www.facebook.com/OpenGovernmentIndonesia)